CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2. NERACA

3. LAPORAN OPERASIONAL

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA 6

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 6

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN 13

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 14

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN 14

3.1.1 PENDAPATAN 14

3.1.2 BELANJA 14

3.2 NERACA 23

3.2.1 ASET 23

3.2.2 KEWAJIBAN 35

3.2.3 EKUITAS 35

3.3 LAPORAN OPERASIONAL 35

3.3.1 PENDAPATAN - LO 35

3.3.2 BEBAN – LO 36

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 44

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN 45

4.1 STRUKTUR ORGANISASI 45

4.2 TUGAS DAN FUNGSI 47

4.3 SUMBER DAYA OPD 47

4.4 PROGRAM PRIORITAS 49

BAB V

PENUTUP 55

LAMPIRAN 56

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Pasal 295 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas kelautan Dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Opresaional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran.

Disadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas kelautan Dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaannya.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 Februari 2025.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr. M. ILYAS, ST.,M.Sc

NIP : 19700606 199603 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan **Dinas Kelautan Dan Perikanan** Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Makassar, 06 Februari 2025.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



IR. M. ILYAS, ST.,M.Sc

NIP. 19700606 199603 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

A. Laporan Realisasi Anggaran;
B. Neraca;
C. Laporan Operasional;
D. Laporan Perubahan Ekuitas dan
E. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan , belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefenisikan sebagai berikut :

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi
b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
d. Penurunan ekuitas (bila deficit operasional) dan peningkatan ekuaitas (bila surplus operasional)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasinal, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

a. Ekuitas awal
b. Surplus / deficit-LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
    1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada priode-priode sebelumnya.
    2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangaan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-trasaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
p. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 44);
q. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 23);

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (Lima) BAB dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.

BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.

BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB V : Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
A.	**PENDAPATAN**		**2.000.000.000,00**		**2.716.520.956,00**		**135.83%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**		**2.000.000.000,00**		**2.716.520.956,00**		**135.83%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0.00		0.00		0.00%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		2.000.000.000,00		2.716.487.706,00		135.82%
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH Melebihi dari target dikarenakan karena pada Upt BPMPP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel terjadi peningkatan pengujian sample sebagai akibat dari Adanya peningkatan kompetensi dan akreditasi pada, telah dilakukan promosi ke kawasan daerah timur seperti ambon gorontalo kendari dll, untuk melakukan pengujian sample pada Upt BPMPP, telah diterapkan aplikasi sejuta ikan yang memudahkan dan mempercepat proses pengujian sample, sistem pembayaran sudah dilakukan dengan sistem Non tunai serta retribusi jasa parkir yang optimal.							
1.1.3	Lain lain PAD yang Sah		0.00		33.250,00		100.00%
B	**BELANJA DAERAH**		**86.862.381.251,99**		**78.957.001.221,50**		**90,90%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100%**	**36.061.806.950,99**	**94,26%**	**34.267.677.875,00**	**94,26%**	**95,02%**
1.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**518.213.800,00**	**100%**	**475.079.729,00**	**100%**	**91,68%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 475.079.729					
Keluaran		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja tepat Waktu					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.702.400,00	2 Dokumen	21.278.000,00	100%	86,14%
REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja narasumber dan moderator konsultasi publik dokumen perencanaan dan efisiensi BBM perjalanan dinas							
1.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	7.835.600,00	1 Dokumen	6.512.000,00	100%	83,11%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi pengadaan belanja Alat tulis kantor , keftas dan cover, dan bahan computer							
1.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.184.000,00	1 Dokumen	2.972.000,00	100%	93,34%
1.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.067.600,00	1 Dokumen	6.026.500,00	100%	99,32%
1.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.196.600,00	1 Dokumen	8.780.000,00	100%	78,42%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi pengadaan belanja Alat tulis kantor , bahan komputer dan perjalanan dinas							
1.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	424.080.200,00	11 Laporan	410.361.500,00	100%	96,77%
1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	41.147.400,00	41.147.400,00	19.149.729,00	100%	46,54%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena narasumber leadership coaching tidak dilaksanakan serta efisiensi pengadaan belanja Alat tulis kantor , kertas dan cover, bahan komputer dan perjalanan dinas							
1.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**30.233.752.419,99**	**100%**	**28.705.326.756,00**	**100%**	**94,94%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 28.705.326.756					
Keluaran		Persentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu					
Sumber Pendanaan		Dana alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	315 Org/Bln	30.213.607.069,99	315 Org/Bln	28.687.865.356,00	100%	94,95%
1.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	762.800,00	12 Dokumen	469.000,00	100%	61,48%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja ATK							
1.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	540.900,00	12 Dokumen	196.000,00	100%	36,24%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja ATK , belanja kertas dan cover serta bahan computer							
1.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	828.800,00	1 Laporan	300.000,00	100%	36,20%

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja ATK , belanja kertas dan cover serta bahan computer							
1.1.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	676.250,00	2 Dokumen	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja ATK dan bahan komputer tidak dilaksanakan							
1.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	17.336.600,00	18 Laporan	16.496.400,00	100%	95,15%
1.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**9.352.300,00**	**100%**	**6.642.500,00**	**100%**	**71,03%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 6.642.500					
Keluaran		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya Laporan administrasi Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	228.300,00	1 Dokumen	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja alat tulis kantor, dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan							
1.1.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.962.000,00	1 Dokumen	6.642.500,00	100%	95,41%
1.1.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.162.000,00	2 Laporan	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja alat tulis kantor, dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan							
1.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**8.150.000,00**	**100%**	**7.828.000,00**	**100%**	**96,05%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 7.828.000					
Keluaran		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah					
Hasil		Tersedianya Laporan Administrasi pendapatan OPD					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.04.00 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	8.150.000,00	1 Dokumen	7.828.000,00	100%	96,05%
1.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**27.688.750,00**	**60,00%**	**14.262.350,00**	**100%**	**51,51%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 14.262.350					
Keluaran		Jumlah Layanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya layanan administrasi Kepegawaian					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.05.00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.265.000,00	-	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena pengadaan mesin absensi tidak dilaksanakan dan perjalanan dinas dalam rangka pemasangan mesin absensi tidak dilaksanakan							
1.1.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.372.000,00	12 Dokumen	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja alat tulis kantor, dan bahan komputer tidak dilaksanakan							
1.1.05.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.475.350,00	12 Dokumen	1.275.350,00	100%	86,44%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja kertas dan cover tidak dilaksanakan							
1.1.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	13.764.400,00	12 Dokumen	12.175.000,00	100%	88,45%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja kertas dan cover dan bahan komputer tidak dilaksanakan							
1.1.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Org	812.000,00	0 Org	812.000,00	100%	100,00%
1.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**421.371.518,00**	**100%**	**385.750.234,00**	**100%**	**91,55%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 385.750.234					
Keluaran		Jumlah Unit layanan Administrasi Administrasi Umum perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	6.269.200,00	3 Paket	5.769.300,00	100%	92,03%
1.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	45.576.718,00	10 Paket	43.853.118,00	100%	96,22%

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
1.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1.956.800,00	1 Paket	1.908.000,00	100%	97,51%
1.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	41.179.900,00	2 Paket	40.469.965,00	100%	98,28%
1.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.067.400,00	12 Laporan	13.619.400,00	100%	84,76%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja makan minum jamuan tamu dan kudapan							
1.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	309.946.900,00	12 Laporan	280.130.451,00	100%	90,38%
1.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	374.600,00	1 Dokumen	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja kertas dan cover, bahan komputer dan perabot kantor tidak dilaksanakan							
1.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.695.757.736,00**	**100%**	**4.567.296.734,00**	**100%**	**97,26%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 4.567.296.734					
Keluaran		Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Hasil		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang urusan OPD					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	882.411.924,00	12 Laporan	833.956.033,00	100%	94,51%
1.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	38.375.000,00	12 Laporan	36.245.000,00	100%	94,45%
1.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139 Laporan	3.774.970.812,00	139 Laporan	3.697.095.701,00	100%	97,94%
1.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**147.520.427,00**	**94,12%**	**105.491.572,00**	**94,12%**	**71,51%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 105.491.572					
Keluaran		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.					
Hasil		Tersedianya barang milik daerah dalam kondisi baik.					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
1.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	39.214.400,00	17 Unit	33.801.400,00	100%	86,20%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja pembayaran pajak 2 kendaraan tidak terealisasi karena akan ditarik oleh bidang aset serta efisiensi belanja bahan bakar							
1.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	25.107.150,00	12 Unit	18.378.926,00	92,31%	73,20%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% adalah efisiensi belanja pembayaran pajak dan pembayaran pajak tidak dilaksanakan karena telah dikembalikan ke bidang aset BKAD							
1.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	13.957.200,00	1 Unit	13.673.688,00	100%	97,97%
1.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	69.241.677,00	2 Unit	39.637.558,00	66,67%	57,25%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena pembuatan sumur bor tidak dilaksanakan karena perusahaan tidak memenuhi persyaratan							
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**100%**	**15.403.256.800,00**	**73,81**	**13.799.122.350,00**	**73,81**	**89,59%**
2.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**100%**	**15.154.475.900,00**	**100%**	**13.566.888.750,00**	**100%**	**89,52%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 13.566.888.750					
Keluaran		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi, Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana pengelolaan ruang laut dan kawasan konservasi yang direhabilitasi					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
2.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	578.435,53 Ha	31.226.000,00	578.435,53 Ha	25.773.210,00	100%	82,54%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% adalah efisiensi belanja cetak dan efisiensi perjalanan dinas							
2.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20.06 Ha	13.519.970.600,00	20.06 Ha	11.981.446.540,00	100%	88,62%

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi pagu kontrak pengadaan mangrove, transplantasi karang, apartemen ikan							
2.1.01.00 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50 Org	230.000,00	50 Org	230.000,00	100%	100,00%
2.1.01.00 05	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	1.603.049.300,00	1 Dokumen	1.559.439.000,00	100%	97,28%
2.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**100%**	**1.174.600,00**	**50%**	**204.400,00**	**50%**	**17,40%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 204.400					
Keluaran		Jumlah Dokumen teknis pemenfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi					
Hasil		Tersedianya dokumen teknisdan rekomendasi pemanfaatan ruang laut					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
2.1.02.00 06	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	4 Dokumen	970.200,00	4 Dokumen	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja kertas dan perjalanan dinas karena pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan melalui online dan pemanfaatan aplikasi perizinan online							
2.1.02.00 07	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	204.400,00	17 Dokumen	204.400,00	425%	100,00%
KETERANGAN REALISASI KELUARAN LEBIH DARI TARGET karena banyaknya permohonan pertimbagan teknis dari pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan							
2.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**100%**	**247.606.300,00**	**71,43%**	**232.029.200,00**	**71,43%**	**93,71%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 232.029.200					
Keluaran		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana di wilayah pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
2.1.03.00 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20 Org	244.536.300,00	20 Org	232.029.200,00	100%	94,89%
2.1.03.00 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	2.170.000,00	0 Kelompok	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena belanja makan rapat Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir tidak dilaksanakan karena tidak ada alokasi belanja narsumber							
2.1.03.00 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	900.000,00	0 Kelompok	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET alokasi belanja Honor narasumber Bimbingan Tehnis MPA Bagi Masyarakat Pesisir tidak dilaksanakan disebabkan ketidaksesuaian alokasi narsaumber dengan kebutuhan kegiatan yang diperlukan yaitu narasumber seharusnya berasal dari praktisi							
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**100%**	**23.032.785.775,00**	**99,38%**	**21.017.626.375,00**		**91,25%**
3.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**100%**	**18.144.525.100,00**	**99,61%**	**16.998.835.018,00**	**99,61%**	**93,69%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 16.998.835.018					
Keluaran		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Jumlah Kelompok Nelayan Yang mendapatkan Pembinaan dan bantuan Pemerintah					
Hasil		Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di laut dan terbinanya nelayan					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
3.1.01.00 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	2.121.200,00	0 Dokumen	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena alokasi belanja fotocopy ,kertas, tinta tidak dilaksanakan disebabkan dalam proses pengadaan tidak mendapatkan penyedia, honor narasumber tidak dilaksanakan karena anggaran pendukung zoom meeting tidak tersedia							
3.1.01.00 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	123 Unit	12.548.508.700,00	123 Unit	11.984.420.000,00	100%	95,50%
3.1.01.00 10	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	131 Unit	5.593.895.200,00	131 Unit	5.014.415.018,00	100%	89,64%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena merupakan efisiensi pagu kontrak, belanja pendukung tidak dilaksanan (efisiensi) belanja cetak, kertas, fotocopy, jasa Tenaga Ahli (Pendamping Program SP Kapal Perikanan) 3 orang 3 bulan karena masuk dalam jasa belanja konsultan pengawas.							
3.1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**100%**	**26.620.000,00**	**100%**	**24.987.000,00**	**100%**	**93,87%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 24.987.000					
Keluaran		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan					
Hasil		Tersdianya sarana prasarana pengelolaan penangkapan ikan di PUD dan terbinanya nelayan					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
3.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Unit	26.620.000,00	3 Unit	24.987.000,00	100%	93,87%
3.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**100%**	**105.000,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp.					
Keluaran		Jumlah rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					
Hasil		Tersedianya rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
3.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	105.000,00	100 Persentase	0,00	100%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% pelayanan menggunakan aplikasi online sehingga tidak membutuhkan fotocopy dokumen							
3.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**100%**	**7.392.400,00**	**100,00%**	**1.890.000,00**	**167,60%**	**25,57%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 1.890.000					
Keluaran		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT					
Hasil		Tersedianya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
3.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	500 Dokumen	7.392.400,00	838 Dokumen	1.890.000,00	167,60%	25,57%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena pelayanan menggunakan aplikasi online sehingga efisiensi belanja kertas, fotocopy dan tinta printer DAN KELUARAN LEBIH DARI TARGET karena sesuai dengan permintaan pemohon							
3.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**100,00%**	**4.854.143.275,00**	**97,30%**	**3.991.914.357,00**	**97,30%**	**82,24%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 3.991.914.357					
Keluaran		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana dan terkelolanya pelabuhan perikanan					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
3.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	4 Pel. Perikanan	15.021.400,00	4 Pel. Perikanan	8.630.000,00	100%	57,45%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena alokasi belanja Rakor Tehnis Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan tidak dilaksanakan karena anggaran zoom tidak tersedia sehingga pencapaian kinerja melalui koordiansi dengan UPT Pelabuhan dan Kabupaten/kota							
3.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	14 Unit	4.797.441.475,00	13 Unit	3.947.699.357,00	92,86%	82,29%
KETERANGAN REALISASI KELUARAN KURANG DARI TARGET karena fasilitasi air tawar bersih PPI pontap tidak terlaksana							
3.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	19 Layanan	41.680.400,00	19 Layanan	35.585.000,00	100%	85,38%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena anggaran pendukung kesyahbandaran pelabuhan wilayah 1 tidak terellisasi yaitu cetak laporan, cetak blanko, kertas dan tinta karena proses pengadaan yang tidak efisien dan efektif dengan anggaran kecil tetapi melalui prosesnya pengadaan yang membutuhkan waktu							
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**100%**	**9.841.571.459,00**	**58,30%**	**7.798.150.451,00**	**58,30%**	**79,24%**
4.1.04	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**100%**	**240.800,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp.					
Keluaran		Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terbit					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
4.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Rekomendasi	240.800,00	-	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena tidak ada permohonan dari pelaku usaha pembudidaya							
4.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**100%**	**8.838.016.400,00**	**99,90%**	**7.047.674.347,00**	**99,90%**	**79,74%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 7.047.674.347					
Keluaran		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
Hasil		Tersedianya sarana prasarana budidaya di laut					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
4.1.05.00 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	240.800,00	0 Dokumen	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena proses pengadaan yang tidak efisien dan efektif dengan anggaran kecil tetapi melalui prosesnya pengadaan yang membutuhkan waktu							
4.1.05.00 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2000 Unit	8.515.056.400,00	2000 Unit	6.766.259.000,00	100%	79,46%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi pagu kontrak belanja pengadaan sarana budidaya rumput laut dan belanja perjalanan dinas							
4.1.05.00 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	288.406.200,00	2 Unit	250.865.347,00	100%	86,98%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja pagu kontrak dan efisiensi belanja perjadin (penginapan)							
4.1.05.00 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	50 Org	2.280.000,00	50 Org	1.720.000,00	100%	75,44%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja cetak dan efisiensi belanja perjadin (transportasi)							
4.1.05.00 11	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	32.033.000,00	1 Unit	28.830.000,00	-	90,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena sarana prasarana pengelolaan kesehatan ikan tidak terlaksana karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan							
4.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**100%**	**1.003.314.259,00**	**75,00%**	**750.476.104,00**	**75,00%**	**74,80%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 750.476.104					
Keluaran		Jumlah sarana dan prasana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
4.1.06.00 03	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	797.989.400,00	2 Unit	596.439.845,00	66,67%	74,74%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena desiminasi udang windu (tidak dilaksanakan) serta efisiensi belanja kontrak							
4.1.06.00 04	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	205.324.859,00	1 Unit	154.036.259,00	100%	75,02%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi kontrak pengadaan minibioflok							
5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**100%**	**1.851.255.867,00**		**1.415.919.880,00**		**76,48%**
5.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**100%**	**1.803.954.267,00**	**100%**	**1.380.903.280,00**	**100,00%**	**76,55%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 1.380.903.280					
Keluaran		Jumlah pertumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana pertumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
5.1.01.00 13	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	27.721.200,00	5 Pelaku Usaha	27.717.700,00	100%	99,99%
5.1.01.00 14	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	700 Pelaku Usaha	1.725.552.067,00	829 Pelaku Usaha	1.303.394.580,00	118,43%	75,53%
REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% Karena pemeliharaan kapal pengawas tidak dilaksanakan (CDK Luwu Raya , CDK Pangkep, dan CDK wilayah selatan), efisiensi kontrak perahu pokmaswas, efisiensi belanja kontrak pemeliharaan kapal pengawas dan efisiensi belanja pendukung fasilitasi NIB dan KUSUKA DAN KELUARAN LEBIH DARI TARGET karena intensnya pengawasan CDK di Pelabuhan perikanan untuk mendukung fasilitasi NIB dan KUSUKA							
5.1.01.00 16	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	4 Pelaku Usaha	28.496.000,00	6 Pelaku Usaha	28.256.000,00	150,00%	99,16%
5.1.01.00 17	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	31 Klp Masyarakat	18.345.000,00	31 Klp Masyarakat	18.195.000,00	100%	99,18%
5.1.01.00 18	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	1 Forum	3.840.000,00	1 Forum	3.340.000,00	100%	86,98%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena narasumber setara Eselon II Rakor Forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tidak terealisasi							

KODE REKENING	URAIAN	TARGET		HASIL		PERSENTASE	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN
5.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**100%**	**47.301.600,00**	**66,67%**	**35.016.600,00**	**66,67%**	**74,03%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 35.016.600					
Keluaran		Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
5.1.02.00 04	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	23.403.600,00	0 Pelaku Usaha	14.753.600,00	0%	63,04%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena pengadaan Test Kit Formalin tidak dilaksanakan disebabkan tidak sesuai dengan harga pasar DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena komponen pembiayaan tidak tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai kebutuhan operasional lapangan							
5.1.02.00 05	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	12.625.200,00	2 Pelaku Usaha	10.933.000,00	100%	86,60%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% adalah efisiensi belanaja perjalan dinas pengawasan penangkapan ikan di PUD							
5.1.02.00 06	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	11.272.800,00	2 Pelaku Usaha	9.330.000,00	200%	82,77%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjalanan dinas di PUD DAN KELUARAN LEBIH DARI TARGET karena adanya laporan dari pihak kab/kota							
6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**100%**	**671.704.400,00**	**75%**	**658.504.290,50**	**75,00%**	**98,03%**
6.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**100%**	**661.710.400,00**	**100%**	**650.459.010,50**	**100%**	**98,30%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 650.459.011					
Keluaran		Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
Hasil		Tersedianya UMKM yang mendapatkan pembinaan mutu dan berdaya saing					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
6.1.02.00 03	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	3 Kegiatan	475.193.400,00	3 Kegiatan	465.184.010,50	100%	97,89%
6.1.02.00 04	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Kegiatan	186.517.000,00	2 Kegiatan	185.275.000,00	100%	99,33%
6.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**100%**	**9.994.000,00**	**50%**	**8.045.280,00**	**50%**	**80,50%**
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 8.045.280					
Keluaran		Jumlah laporan bahan baku Industri pengolahan ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan					
Hasil		Tersedianya laporan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa					
6.1.03.00 01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	9.826.400,00	1 Dokumen	8.045.280,00	100%	81,87%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja cetak dan perjalanan dinas dalam kota							
6.1.03.00 05	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi	167.600,00	0 Sistem Informasi	0,00	-	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena Belanja pendukung cetak laporan hasil kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran logistik perikanan yang teralokasi di APBN 2025 tidak terlaksana							

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 yang mempengaruhi pengelolaan keuangan diantaranya adalah. Efisiensi belanja rutin seperti ATK dan Cetak karena penggunaan Aplikasi online dan persuratan elektronik, efisiensi perjalanan dinas karena optimalisasi koordinasi dengan kebupaten/kota, adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi serta adanya beberapa Anggaran kegiatan yang teralokasi di APBN 2025 tidak terlaksana.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 PENDAPATAN– LRA

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
2.000.000.000,00	2.716.520.956,00	135.83	1.928.587.966,00

Pendapatan Daerah yang direncanakan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dapat direalisir sebesar Rp. 2.716.520.956,00 terdapat selisih lebih Anggaran sebesar Rp. 716.520.956,00 atau 135,83%, Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. 1.928.587.966,00 Mengalami peningkatan sebesar Rp. 787.932.990,00 atau 70,99%. Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET 2025	Realisasi	
			Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	
2.	Pendapatan Retribusi daerah	2.000.000.000,00	2.716.487.706,00	1.928.483.466,00
3.	Lain – lain PAD yang Sah	0,00	33.250,00	104.500,00
Jumlah		2.000.000.000,00	2.716.520.956,00	1.928.587.966,00

3.1.2 BELANJA LRA

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
86.862.381.251,99	78.957.001.221,50	90,90	85.995.489.124,00

Belanja Daerah yang direncanakan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 86.862.381.251,99 dapat direalisir sebesar Rp. 78.957.001.221,50 terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 7.905.380.030,49 atau 94,02%, Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. 85.995.489.124,00,- Mengalami penurunan sebesar Rp. 7.038.487.902,50,- atau 8,18%.

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1.	Belanja Operasi	82.727.782.392,99	75.655.811.052,50	63.203.302.409,00
2.	Belanja Modal	4.134.598.859,00	3.301.190.169,00	22.792.186.715,00
Jumlah		86.862.381.251,99	78.957.001.221,50	85.995.489.124,00

3.1.2.1 Belanja Operasi

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
82.727.782.392,99	75.655.811.052,50	91,45	63.203.302.409,00

Belanja Operasi yang direncanakan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 82.727.782.392,99 dapat direalisir sebesar Rp. 75.655.811.052,50**,-** terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 7.071.971.340,49 atau 93,40%, Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. 63.203.302.409,00,- Mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.071.971.340,49**,-** atau 11,19%. Belanja Operasi terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1.	Belanja Pegawai	29.008.667.069,99	27.743.985.356,00	27.849.221.108,00
2.	Belanja Barang	53.719.115.323,00	47.911.825.696,50	35.354.081.301,00
Jumlah		82.727.782.392,99	75.655.811.052,50	63.203.302.409,00

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai /Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
29.008.667.069,99	27.743.985.356,00	95,64	27.849.221.108,00

Adapun Belanja Pegawai dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.157.263.949,00	16.359.158.661,00	13.703.066.180,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.851.403.120,99	11.384.826.695,00	13.167.489.928,00
3.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya			978.665.000,00
Jumlah		29.008.667.069,99	27.743.985.356,00	27.849.221.108,00

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
53.719.115.323,00	47.911.825.696,50	89,19	35.354.081.301,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Bahan Pakai Habis	41.772.119.818,00	37.022.762.866,00	22.568.102.288,00
2	Belanja Jasa Kantor	5.044.572.905,00	4.594.858.415,50	6.266.635.551,00
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	658.290.996,00	630.900.645,00	1.421.921.932,00
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	1.560.397.512,00	1.549.320.000,00	1.813.721.000,00

5	Belanja jasa konsultasi konstruksi	2.302.492.875,00	2.220.546.677,00	354.500.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud			21.160.000,00
7	Belanja sewa gedung dan bangunan			
8	Belanja Permeliharaan	591.078.117,00	278.505.838,00	440.013.980,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	1.790.163.100,00	1.614.931.255,00	2.468.026.550,00
Jumlah		53.719.115.323,00	47.911.825.696,50	35.354.081.301,00

Belanja Barang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan direncanakan sebesar Rp. 39.374.865.989,00**.-** dapat direalisir sebesar Rp. 35.354.081.301,00**,-** atau 89.79% terdapat sisa anggaran sebesar 4.020.784.688,00,-. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Bahan Pakai Habis

TAHUN 2025		%	TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI		
41.772.119.818,00	37.022.762.866,00	88,63	22.568.102.288,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	177.353.400,00	172.605.000,00	399.599.445,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	344.301.700,00	280.595.900,00	415.859.590,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	30.958.800,00	30.482.274,00	19.791.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.296.011.600,00	1.213.657.540,00	2.950.618.595,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.195.021.000,00	3.625.381.895,00	967.600.369,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.161.000,00	46.065.000,00	127.906.500,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.898.550,00	32.561.100,00	82.043.150,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	35.806.918,00	30.511.118,00	109.181.017,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34.350.000,00	34.150.065,00	15.145.800,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.352.000,00	1.300.000,00	7.950.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.388.150,00	17.593.550,00	77.687.109,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.001.000,00	1.908.000,00	97.160.227,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.269.200,00	5.769.300,00	18.904.432,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	7.620.000,00

15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata	3.180.000,00	2.700.000,00	57.197.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.660.000,00	11.100.000,00	71.842.000,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	34.620.000,00	34.282.350,00	4.100.000,00
18	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.424.243.200,00	31.430.099.217,00	16.583.995.014,00
19	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.570.400,00	20.744.657,00	42.033.000,00
20	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	177.353.400,00	172.605.000,00	
21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.300.000,00	4.991.000,00	379.234.140,00
22	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.605.500,00	12.645.500,00	68.093.900,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.067.400,00	13.619.400,00	
24	Belanja Pakaian Olahraga			
25	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			
26	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			64.540.000,00
27	Belanja Pakaian KORPRI			
JUMLAH		41.772.119.818,00	37.022.762.866,00	22.568.102.288,00

BELANJA JASA KANTOR

TAHUN 2025		%	TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI		
5.044.572.905,00	4.594.858.415,50	91,09	6.266.635.551,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.600.000,00	12.050.000,00	53.250.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	188.100.000,00	188.100.000,00	
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.761.800.000,00	1.754.800.000,00	3.122.000.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.500.000,00	0,00	92.726.046,00
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.561.344,00	175.516.704,00	396.061.965,00
6	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.945.168,00	21.945.168,00	484.075.735,00
7	Belanja Jasa Tenaga Supir	95.095.728,00	65.813.184,00	308.048.195,00
8	Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO	150.000.000,00	148.740.000,00	188.012.499,00
9	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			62.545.714,00

10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	350.000.000,00	337.828.500,00	665.450.000,00
11	Belanja Jasa Kalibrasi	22.856.000,00	22.468.342,50	
12	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.816.000,00	3.816.000,00	1.800.000,00
13	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	60.000.000,00	48.592.000,00	
14	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			5.000.000,00
15	Belanja Tagihan Air	12.453.000,00	5.199.610,00	8.398.712,00
16	Belanja Tagihan Listrik	807.538.988,00	767.217.119,00	750.797.454,00
17	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV	64.100.000,00	61.539.304,00	102.036.083,00
18	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	49.066.677,00	34.552.484,00	17.447.148,00
19	Belanja Lembur			8.986.000,00
20	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.164.140.000,00	933.680.000,00	
21	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000,00	10.200.000,00	
22	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	4.200.000,00	2.800.000,00	
JUMLAH		5.044.572.905,00	4.594.858.415,50	6.266.635.551,00

BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
658.290.996,00	630.900.645,00	95,84	1.421.921.932,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	135.493.965,00	115.857.735,00	236.368.432,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.129.376,00	4.770.000,00	9.846.000,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.161.720,00	5.962.500,00	12.307.500,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	300.000.000,00	300.000.000,00	692.500.000,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	204.000.000,00	204.000.000,00	470.900.000,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	465.615,00	310.410,00	

7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	10.080,00		
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	30.240,00		
JUMLAH		658.290.996,00	630.900.645,00	1.421.921.932,00

BELANJA SEWA PERALATAN DAN MESIN

TAHUN 2025		%	TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI		
1.560.397.512,00	1.549.320.000,00	99,29	1.813.721.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya			
2	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.560.397.512,00	1.549.320.000,00	1.813.721.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
JUMLAH		1.560.397.512,00	1.549.320.000,00	1.813.721.000,00

BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

TAHUN 2025		%	TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI		
2.302.492.875,00	2.220.546.677,00	96,44	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.602.235.500,00	1.559.439.000,00	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	700.257.375,00	661.107.677,00	0,00
JUMLAH		2.302.492.875,00	2.220.546.677,00	0,00

BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

TAHUN 2025		%	TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI		
0,00	0,00	0,00	354.500.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan bantuan Teknik			240.200.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus			114.300.000,00
JUMLAH				354.500.000,00

BELANJA SEWA ASET TIDAK BERWUJUD

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
			21.160.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software			21.160.000,00
JUMLAH				**21.160.000,00**

BELANJA PEMELIHARAAN

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
591.078.117,00	278.505.838,00	47,12	440.013.980,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.101.700,00	2.591.500,00	35.941.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	529.460.217,00	219.932.650,00	24.994.980,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.725.000,00	8.725.000,00	3.180.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya			198.135.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan			99.844.500,00

	Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya			
7	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.970.000,00	18.220.000,00	5.690.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.680.000,00	9.300.000,00	3.750.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			18.978.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.141.200,00	9.857.688,00	
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II			
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			
13	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	9.879.000,00	
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software			49.500.000,00
JUMLAH		591.078.117,00	278.505.838,00	440.013.980,00

PERJALANAN DINAS

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
1.790.163.100,00	1.614.931.255,00	90,21	2.468.026.550,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.723.288.100,00	1.551.566.255,00	2.374.953.809,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.575.000,00	62.065.000,00	34.060.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			57.582.741,00
JUMLAH		1.790.163.100,00	1.614.931.255,00	2.468.026.550,00

3.1.2.2 BELANJA MODAL

TAHUN 2025		%	TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI		
4.134.598.859,00	3.301.190.169,00	79,84	22.792.186.715,00

Belanja Modal pada Dinas Kelautan Dan Perikanan T.A. 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.134.598.859,00,- terealisi sebesar Rp. 3.301.190.169,00,- atau 79,84% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 833.408.690,00,- jika dibandingkan Realiasi T.A.2024 sebesar Rp. 22.792.186.715,00,- Berkurang sebesar Rp. 19.490.996.546,00,- atau 85,52%.

Rincian belanja Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1.	Belanja Tanah			
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	262.849.000,00	249.448.230,00	1.360.484.800,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	789.674.859,00	581.701.939,00	4.345.261.435,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.082.075.000,00	2.470.040.000,00	17.086.440.480,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Jumlah		4.134.598.859,00	3.301.190.169,00	22.792.186.715,00

3.1.2.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
262.849.000,00	249.448.230,00	94,90	1.360.484.800,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Modal Alat Besar	38.756.000,00	37.877.000,00	56.720.000,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
4	Belanja Modal Alat angkutan	84.906.000,00	83.000.000,00	392.000.000,00
5	Belanja Modal Alat bengkel			
6	Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga	53.751.000,00	44.163.500,00	457.585.000,00
7	Belanja Modal Alat Studio, komunikasi, dan Pemancar			13.200.000,00
8	Belanja modal pengadaan alat ukur			16.565.000,00
9	Belanja Modal alat laboratorium			74.758.800,00
10	Belanja modal pengadaan instalasi			
11	Belanja modal Komputer	85.436.000,00	84.407.730,00	349.656.000,00
12	Belanja modal pengadaan konstruksi			-
13	Belanja modal buku pustaka			-
14	Belanja Modal alat alat informasi			-
15	Belanja Modal Pengadaan keamanan			-
JUMLAH		262.849.000,00	249.448.230,00	1.360.484.800,00

3.1.2.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
789.674.859,00	581.701.939,00	73,66	4.345.261.435,00

Rincian belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung			
2	Belanja Modal Bangunan Gedung	789.674.859,00	581.701.939,00	4.345.261.435,00
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan			-
4	Belanja modal tugu titik kontrol/pasti			
5	Belanja Modal Pengadaan / Pembelian Konstruksi / Bangunan / Alat Informasi			-
Jumlah		789.674.859,00	581.701.939,00	4.345.261.435,00

3.1.2.2.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

TAHUN 2025			TAHUN 2024
ANGGARAN	REALISASI	%	
3.082.075.000,00	2.470.040.000,00	80,14	17.086.440.480,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	
			TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Belanja modal jalan dan jembatan			643.944.151,00
2	Belanja modal bangunan air	3.082.075.000,00	2.470.040.000,00	16.208.746.015,00
3	Belanja modal instalasi			34.878.000,00
4	Belanja modal jaringan			198.872.314,00
Jumlah		**3.082.075.000,00**	**2.470.040.000,00**	**17.086.440.480,00**

3.2 NERACA

3.2.1 ASET

31 Desember 2025	31 Desember 2024
997.953.996.619,42	1.042.774.531.507,03

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara kerana alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Aset Lancar	1.157.401.075,00	1.291.265.072,00
2	Aset Tetap	962.747.434.070,75	980.971.366.359,69
3	Aset Lainnya	34.049.161.473,67	60.511.900.075,34
Jumlah		**997.953.996.619,42**	**1.042.774.531.507,03**

3.2.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.157.401.075,00	1.291.265.072,00

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya dan persediaan. Nilai Aset Lancar Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.157.401.075,00 dan Rp. 1.291.265.072,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran		
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Belanja Dibayar Dimuka	441.993.200,00	441.993.200,00
4	Assuransi dibayar dimuka		
5	Persediaan	715.407.875,00	849.271.872,00
Jumlah		**1.157.401.075,00**	**1.291.265.072,00**

3.2.1.1.1 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 715.407.875,00 (*daftar opname persediaan terlampir).* Sedangkan pada posisi persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 849.271.872,00,- terjadi penurunan Persediaan sebesar Rp. -133.863.997,00 terdiri dari persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan pakai habis terdiri atas bahan, suku cadang, obat-obatan, Persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategi, natura dan pakan. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.080.025,00	9.056.157,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.500.000,00	26.977.890,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku		
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		
5	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	652.527.350,00	772.139.875,00
6	Persediaan Bahan Lainnya	46.065.000,00	31.746.000,00
7	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.131.500,00	8.599.000,00
8	Persediaan Kertas dan Cover	3.690.000,00	
9	Persediaan Bahan Cetak		
10	Persediaan Benda Pos		
11	Persediaan Bahan Komputer		
12	Persediaan Perabot Kantor	523.400,00	152.950,00
13	Persediaan Alat Listrik	1.890.600,00	
14	Persediaan Suvenir/Cendera Mata		
15	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
16	Persediaan Obat-obatan Lainnya		600.000,00
17	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		

18	Pakan		
19	Persediaan Makanan dan Minuman Rapat		
20	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
21	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
22	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH		
23	Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
24	Persediaan Pakaian KORPRI		
Jumlah		**715.407.875,00**	**849.271.872,00**

3.2.1.2 Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
962.747.434.070,75	980.971.366.359,69

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **962.747.434.070,75** dan 2024 sebesar Rp. **980.971.366.359,69** dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 JANUARI 2025	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2025		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Tanah	135.404.208.000,00		4.533.750.000,00	130.870.458.000,00
2	Peralatan dan mesin	69.119.729.539,00	610.474.430,00	3.023.897.200,00	66.312.906.769,00
3	Gedung dan bangunan	2.021.316.334.508,52	47.344.345.340,50	761.062.939,00	2.067.899.616.910,02
4	Jalan, irigasi dan jaringan	203.349.007.967,99	4.194.450.289,00	2.474.040.000,00	205.069.418.256,99
5	Asset tetap lainnya	1.689.587.000,00			1.689.587.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	495.359.780,00	563.027.080,00	99.844.500,00	958.542.360,00
7	Akumulasi penyusutan asset tetap	(1.450.402.860.435,82)	(62.873.282.672,06)	(2.829.647.882,62)	(1.510.446.495.225,26)
T O T A L		**980.971.366.359,69**	**(10.160.985.532,56)**	**8.062.946.756,38**	**962.747.434.070,75**

3.2.1.2.1 Tanah

Tanah Merupakan nilai Tanah per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 135.404.208.000,00 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 130.870.458.000,00yang terdiri dari:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 JANUARI 2025	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2024		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	

1	Tanah	135.404.208.000,00		4.533.750.000,00	130.870.458.000,00
2	Tanah BLUD				
TOTAL		135.404.208.000,00		4.533.750.000,00	130.870.458.000,00

3.2.1.2.1.1 Tanah

Tanah Kantor Merupakan nilai tanah kantor per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**135.404.208.000,00**
Mutasi Berkurang		
Penyesuaian berkurang karena adanya	Rp.	(4.033.750.000,00)
Reklasifikasi Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian berkurang Reklasifikasi	Rp.	(500.000.000,00)
Penyesuaian Saldo Awal		
Mutasi antar OPD	Rp.	
Jumlah	**Rp.**	**130.870.458.000,00**

3.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 66.706.306.769,00 yang terdiri dari:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 JANUARI 2025	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2024		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat-alat Besar	10.200.679.350,00	37.877.000,00	37.877.000,00	10.200.679.350,00
2	Alat-alat Angkutan	24.483.048.050,00	247.000.000,00	2.941.856.700,00	21.788.191.350,00
3	Alat Bengkel dan alat ukur	2.524.370.200,00			2.524.370.200,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	629.000.000.00			629.000.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	15.663.311.616,00	193.939.700,00	44.163.500,00	15.813.087.816,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	931.624.570,00			931.624.570,00
7	Alat kedokteran				
8	Alat Laboratorium	10.782.816.645,00			10.782.816.645,00
9	Alat Keamanan/ persenjataan	6.999.850.00			6.999.850,00
10	Komputer	3.458.941.580,00	131.657.730,00		3.590.599.310,00
11	Alat eksplorasi				
12	Alat keselamatan kerja	402.163.000,00			402.163.000,00
13	Rambu rambu	36.774.687,00			36.774.678,00
TOTAL		69.119.729.539,00	610.474.430,00	3.023.897.200,00	66.706.306.769,00

3.2.1.2.2.1 Alat-alat Besar

Alat-alat Besar Merupakan nilai Alat-alat berat per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**10.200.679.350,00**
Mutasi bertambah		
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	37.877.000,00
Mutasi berkurang		
Reklasifikasi Berkurang atas Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	(37.877.000,00)
Lainnya (P3D)	Rp.	
Penghapusan	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**10.210.129.350,00**

3.2.1.2.2.2 Alat-alat Angkutan

Alat-alat Angkutan Merupakan nilai Alat-alat angkutan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**24.483.048.050,00**
Mutasi bertambah		
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	83.000.000,00
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi Atas Saldo Awal	Rp.	164.000.000,00
Mutasi berkurang		
Mutasi Berkurang Antar OPD	Rp.	(654.737.000,00)
Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan SK	Rp.	(1.646.719.700,00)
Penghapusan Nomor : 000.2.3.2/8606/BKAD,		
Tanggal 01 Juli 2025 dan SK Penghapusan Nomor :		
1911/XI/TAHUN 2025, Tanggal 24 November 2025		
Reklasifikasi Berkurang Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(557.400.000,00)
Reklasifikasi Berkurang Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	(83.000.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**21.788.191.350,00**

3.2.1.2.2.3 Alat-alat Bengkel dan alat ukur

Alat-alat bengkel Merupakan nilai Alat bengkel per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**2.524.370.200,00**
Realisasi belanja modal TA 2025	Rp.	
Lainnya (P3D)	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**2.524.370.200,00**

3.2.1.2.2.4 Alat-Alat Pertanian dan Peternakan

Alat-alat Pertanian dan Peternakan Merupakan nilai Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**629.000.000,00**
Realisasi belanja modal TA 2025	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**629.000.000,00**

3.2.1.2.2.5 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan rumah tangga Merupakan nilai Alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025		**Rp. 15.663.311.616,00**
Mutasi bertambah		
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	44.163.500,00
Reklasifikasi Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	120.877.000,00
Mutasi Bertambah Lainnya (P3D)	Rp.	28.899.200,00
Mutasi berkurang		
Reklasifikasi berkurang atas Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	(44.163.500,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**15.813.087.816,00**

3.2.1.2.2.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi dan pemancar

Alat-alat studio dan komunikasi Merupakan nilai Alat-alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**931.624.570,00**
Realisasi belanja modal TA 2025	Rp.	
Pengurangan belanja atas pembayaran utang tahun sebelumnya	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**931.624.750,00**

3.2.1.2.2.7 Alat Laboratorium

Alat laboratorium merupakan nilai Alat laboratorium per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025		**Rp. 10.782.816.645,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Lainnya	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025		**Rp. 10.782.816.645,00**

3.2.1.2.2.8 Alat Persenjataan

Alat keamanan merupakan nilai Alat keamanan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**6.999.850,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**6.999.850,00**

3.1.5.2.2.9 Komputer

Alat komputer merupakan nilai Alat komputer per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**3.458.941.580,00**
Mutasi bertambah		
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	84.407.730,00
Mutasi Bertambah Lainnya (P3D)	Rp.	47.250.000,00
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**3.590.599.310,00**

3.1.5.2.2.10 Alat keselamatan kerja

Alat keselamatan merupakan nilai Alat keselamatan per 31 Desember 2025 terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**402.163.000,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**402.163.000,00**

3.1.5.2.2.11 Rambu - rambu

Alat rambu rambu merupakan nilai Alat rambu rambu per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**36.774.678,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**36.774.678,00**

3.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 JANUARI 2025	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2024		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Bangunan Gedung	2.016.471.830.768,58	46.795.756.340,50	761.062.939,00	2.062.506.524.170,08
2	Monumen				
3	Bangunan Menara	170.306.523,00			170.306.523,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.674.197.216,94	548.589.000,00		5.222.786.216,94
5	Gedung dan Bangunan BLUD				
TOTAL		2.021.316.334.508,52	47.344.345.340,50	761.062.939,00	2.067.899.616.910,02

3.1.5.2.3.1 Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**2.016.855.655.909.58**
Saldo Awal Utang 1 Januari 2025	**Rp.**	**18.674.859,00**
Mutasi bertambah		
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	581.701.939,00
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	37.371.052.760,00
Reklasifikasi Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	2.514.203.500,00
Mutasi Bertambah Lainnya	Rp.	6.328.798.141,50
Mutasi berkurang		
Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	Rp.	(18.674.859,00)
Reklasifikasi Pengurangan Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(179.361.000,00)
Reklasifikasi Pengurangan Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	(563.027.080,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**2.062.506.524.170,08**

3.1.5.2.3.2 Bangunan Menara

bangunan menara merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**170.306.523,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**170.306.523,00**

3.1.5.2.3.3 Tugu Titik Control/ Pasti

Tugu titik control/pasti merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**4.674.197.216,94**
Mutasi bertambah		
Mutasi Bertambah Lainnya (P3D)	Rp.	548.589.000,00
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**5.222.786.216,94**

3.1.5.2.4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 JANUARI 2025	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2024		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Jalan dan Jembatan	41.278.480.292,37	841.014.289,00		42.119.494.581,37
2	Bangunan Air	158.007.900.804,74	3.169.609.000,00	2.474.040.000,00	158.703.469.804,74
3	Instalasi	2.747.089.656,88			2.747.089.656,88
4	Jaringan	1.315.537.214,00	183.827.000,00		1.499.364.214,00
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD				
TOTAL		203.349.007.967,99	4.010.623.289,00	2.474.040.000,00	205.069.418.256,99

3.1.5.2.4.1 Jalan dan Jembatan,

Jalan dan jembatan merupakan nilai jalan dan jembatan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**41.278.480.292,37**
Mutasi bertambah		
Mutasi Bertambah Lainnya (P3D)	Rp.	841.014.289,00
Reklasifikasi Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**42.119.494.581,37**

3.1.5.2.4.2 Bangunan Air

Bangunan air merupakan nilai bangunan air per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**158.007.900.804,74**
Mutasi bertambah		
Realisasi belanja modal T.A 2025	Rp.	2.470.040.000,00
Reklasifikasi bertambah Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	4.000.000,00

Mutasi Bertambah Lainnya (P3D)	Rp.	695.569.000,00
Mutasi berkurang		
Pengurangan belanja atas pembayaran utang tahun sebelumnya	Rp.	(487.179.446,00)
Reklasifikasi Berkurang Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(4.000.000,00)
Reklasifikasi Pengurangan atas Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	(2.470.040.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**158.703.469.804,74**

3.1.5.2.4.3 Instalasi

Instalasi merupakan nilai instalasi per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**2.747.089.656,88**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**2.747.089.656,88**

3.1.5.2.4.4 Jaringan

Jaringan merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**1.315.537.214,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Mutasi bertambah		
Mutasi Bertambah Lainnya (P3D)	Rp.	183.827.000,00
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2024	**Rp.**	**1.499.364.214,00**

3.1.5.2.5.1 Bahan Perpustakaan

Buku dan perpustakaan merupakan nilai buku dan perpustakaan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**1.378.801.000.00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**1.378.801.000.00**

3.1.5.2.5.4 Tanaman

merupakan nilai tanaman per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**249.750.000,00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**249.750.000,00**

3.1.5.2.6 Aset Tetap Renovasi

Asset tetap renovasi merupakan nilai Aset tetap per 31 desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	Rp.	**61.036.000,00**
Realisasi belanja modal TA 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**61.036.000,00**

3.1.5.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP merupakan nilai KDP per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**495.359.780,00**
Mutasi bertambah		
Reklasifikasi bertambah atas Penyesuaian Belanja APBD berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi No. 032/19/I/BKAD tanggal 02 Januari 2026 dari Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	563.027.080,00
Mutasi berkurang		
Reklasifikasi berkurang atas Penyesuaian Belanja APBD	Rp.	(99.844.500,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**958.542.360,00**

3.1.5.2.8 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai aset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset.

No	Jenis Aset Tetap	Saldo 1 Januari 2025	Tahun 2025			Saldo 31 Desember 2025
			Belanja Modal / Penyusutan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	(58.185.557.581,41)	(2.728.884.470,41)	(2.805.333.670,41)	(2.763.583.247,62)	(58.227.308.004,20)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	(1.238.238.644.611,67)	(41.132.824.298,80)	(51.680.053.637,85)	(66.064.635,00)	(1.289.852.633.614,52)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	(153.917.622.242,74)	(7.197.893.284,54)	(8.387.895.363,80)		(162.305.517.606,54)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(61,036,000.00)				(61.036.000,00)
TOTAL		(1.450.402.860.435,82)	(51.059.602.053,75)	(62.873.282.672,06)	(2.829.647.882,62)	(1.510.446.495.225,26)

Adapun nilai akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2025 sebesar (1.510.446.495.225,26) terdiri dari :

3.1.5.2.6.1 Penyusutan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan nilai Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**(58.185.557.581,41)**
Mutasi bertambah		
Belanja Modal / Beban Penyusutan	Rp.	(2.728.884.470,41)
Reklasifikasi Penyesuaian Saldo Awal	Rp.	(300.000,00)

Lainnya	Rp.	(76.149.200,00)
Mutasi berkurang		
Mutasi Antar OPD	Rp.	(622.030.214,29)
Penghapusan	Rp.	(1.646.719.700,00)
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi Atas Saldo Awal	Rp.	(393.700.000.,00)
Koreksi Ekuitas	Rp.	(101.133.333,33)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**(58.227.308.004,20)**

3.1.5.2.6.2 Penyusutan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan nilai penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**(1.238.238.644.611,67)**
Mutasi bertambah		
Belanja Modal / Beban Penyusutan	Rp.	(41.132.824.298,80)
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(6.210.818.043,33)
Koreksi Ekuitas	Rp.	(2.299.441.176,04)
Mutasi Bertambah Lainnya	Rp.	(2.036.970.119,68)
Mutasi berkurang		
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(66.064.635,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**(1.289.852.633.614,52)**

3.1.5.2.6.3 Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan nilai Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**(153.917.622.242,74)**
Mutasi bertambah		
Belanja Modal / Beban Penyusutan	Rp.	(7.197.893.284,54)
Mutasi Bertambah Lainnya	Rp.	(1.190.002.079,26)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**(162.305.517.606,54)**

3.1.5.2.6.4 Penyusutan Aset tetap lainnya

Asset tetap lainnya merupakan nilai Penyusutan asset tetap lainnya per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**(61.036.000,00)**
Mutasi bertambah		
Belanja Modal / Beban Penyusutan	Rp.	
Mutasi berkurang		
Lainnya	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**(61.036.000,00)**

3.1.5.2.7 Aset Lainnya

3.1.5.2.7.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan nilai asset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**-**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**-**

3.1.5.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan nilai asset tak berwujud per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**477.516.500.00**
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**477.516.500.00**

3.1.5.3.2 Asset lain lain

Asset lain lain merupakan nilai asset lain lain per 31 desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**68.451.392.527,00**
Mutasi bertambah		
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	5.106.511.000,00
Mutasi berkurang		
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(37.271.208.260,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**36.286.695.267,00**

3.1.5.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan nilai asset lain lain per 31 desember 2025 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**(237.714.708,33)**
Mutasi bertambah		
Realisasi Belanja Modal T.A. 2025	Rp.	(49.394.750.00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**(287.109.458,33)**

3.1.5.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan nilai penyusutan asset lain-lain per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025	**Rp.**	**(8.179.294.243,33)**
Mutasi bertambah		
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(459.464.635,00)
Mutasi berkurang		
Reklasifikasi Penyesuaian Kondisi atas Saldo Awal	Rp.	(6.210.818.043,33)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2025	**Rp.**	**(2.427.940.835,00)**

3.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari :

NO	JENIS KEWAJIBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	84.926.781,00	2.292.632.243,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang		
3.	Pendapatan diterima dimuka		
Jumlah		**84.926.781,00**	**2.292.632.243,00**

3..2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

NO	URAIAN	TOTAL UTANG	SUMBER DANA
I	UTANG BARANG DAN JASA		
	Utang beban jasa Listrik	78.948.219,00	APBD
	Utang beban jasa kawat/faksimili/internet	5.978.562,00	APBD
	TOTAL	**84.926.781,00**	

3.2.3 EKUITAS

31 Desember 2025	31 Desember 2024
921.661.296.358,63	956.414.998.106,03

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp. 921.661.296.358,63 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 956.414.998.106,03.

3.3 LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1 PENDAPATAN – LO

REALISASI	
TAHUN 2025	TAHUN 2024
2.716.520.956,00	1.928.587.966,00

Pendapatan-lo Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.716.520.956,00, Realisasi pendapatan-LO meningkat dari tahun sebelumnya, pendapatan dapat dirinci sebagai beikut:

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.716.487.706,00	1.928.483.466,00
2	Lain lain pendapatan yang sah	33.250,00	104.500,00
Jumlah		2.716.520.956,00	1.928.587.966,00

Informasi tentang rincian dan penjelasan Pos pendapatan-LO yang terdiri dari:

No	URAIAN	Realisasi	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Pendapatan retribusi daerah	2.716.487.706,00	1.928.483.466,00
2	Lain lain PAD yang sah	33.250,00	104.500,00
3	Pendapatan hibah		
4	Pendapatan diterima dimuka		
JUMLAH		2.716.520.956,00	1.928.587.966,00

3.2.2 BEBAN– LO

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
124.709.641.250,25	99.057.099.640,09	25.652.541.610,16

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1.	Beban Operasi	73.600.644.446,50	49.298.119.621,12	24.302.524.825,38
2.	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	51.108.996.803,75	49.758.980.018,97	1.350.016.784,78
Jumlah		124.709.641.250,25	99.057.099.640,09	25.652.541.610,16

3.3.2.1 Beban Operasi

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
73.600.644.446,50	49.298.119.621,12	24.302.524.825,38

Beban Operasi Tahun Anggaran 2025 bersaldo sebesar Rp. 73.600.644.446,50 sedangkan pada tahun 2024 bersaldo Rp. 49.298.119.621,12 terdapat kenaikan sebesar 24.302.524.825,38 dari tahun sebelumnya.

Terdapat selisih antara realisasi Belanja Operasional dengan Beban operasi sebagai berikut:

Belanja Operasi LRA	: Rp.	75.655.811.052,50
Persediaan Utang Tahun Lalu	: Rp.	849.271.872,00
Persediaan Utang Tahun Ini	: Rp.	(715.407.875,00)
Utang Beban Tahun Lalu	: Rp.	(2.273.957.384,00)
Utang Beban Tahun Ini	: Rp.	84.926.781,00
Beban Operasi	: Rp.	73.600.644.446,50

Beban operasi terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1.	Beban Pegawai	26.513.142.141,00	28.107.038.971,00	(1.593.896.830,00)
2.	Beban barang dan jasa	47.087.502.305,50	21.191.080.650,12	25.896.421.655,38
Jumlah		73.600.644.446,50	49.298.119.621,12	24.302.524.825,38

3.3.2.2 Beban Pegawai

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
26.513.142.141,00	28.107.038.971,00	(1.593.896.830,00)

Beban Pegawai terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	16.168.589.573,00	13.893.635.268,00	2.274.954.305,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	10.344.552.568,00	14.213.403.703,00	(3.868.851.135,00)
Jumlah		26.513.142.141,00	28.107.038.971,00	(1.593.896.830,00)

3.3.2.2.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
16.168.589.573,00	13.893.635.268,00	2.274.954.305,00

Beban Gaji dan Tunjangan terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1.	Beban Gaji Pokok PNS	10.412.290.731,00	10.652.538.700,00	(240.247.969,00)
2.	Beban Gaji Pokok PPPK	2.280.593.100,00		2.280.593.100,00
3.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	939.473.086,00	963.823.484,00	(24.350.398,00)
4.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	158.801.098,00		158.801.098,00
5.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	477.600.000,00	549.260.000,00	(71.660.000,00)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	59.270.000,00	62.720.000,00	(3.450.000,00)
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	324.025.000,00	321.490.000,00	2.535.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	143.025.000,00		143.025.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	499.046.220,00	517.803.000,00	(18.756.780,00)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	135.063.300,00		135.063.300,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	110.304.380,00	116.775.219,00	(6.470.839,00)

12	Beban Pembulatan Gaji PNS	122.637,00	136.109,00	(13.472,00)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	48.673,00		48.673,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	418.165.624,00	621.359.538,00	(203.193.914,00)
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	103.296.674,00		103.296.674,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.392.366,00	21.932.214,00	(539.848,00)
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.473.656,00		5.473.656,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	64.177.705,00	65.797.004,00	(1.619.299,00)
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	16.420.323,00		16.420.323,00
Jumlah		16.168.589.573,00	13.893.635.268,00	2.274.954.305,00

3.3.2.2.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
10.344.552.568,00	14.213.403.703,00	(3.868.851.135,00)

Beban Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.211.148.821,00	5.070.487.421,00	140.661.400,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.680.801.736,00	3.354.128.294,00	(1.673.326.558,00)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.452.602.011,00	4.810.122.988,00	(1.357.520.977,00)
Jumlah		10.344.552.568,00	14.213.403.703,00	(3.868.851.135,00)

3.2.5.3.1 Beban Persediaan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
37.043.879.795,00	9.116.429.755,12	27.927.450.039,88

Beban Persediaan merupakan nilai beban persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 37.043.879.795,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	175.581.132,00	190,777,143.00	(15.196.011)
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	241.080.590,00	478,047,550.00	(236.966.960)

3	Beban bahan baku	30.482.274,00	19,791,000.00	10.691.274
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.213.657.540,00	1,724,376,495.00	(510.718.955)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.744.994.420,00	402,152,265.00	3.342.842.155
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	31.746.000,00	96,160,500.00	(64.414.500)
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.428.700,00	110,238,750.00	(72.810.050)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.067.500,00	136,382,584.12	(122.315.084)
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.250.065,00	36,596,000.00	(18.345.935)
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	7,950,000.00	(6.650.000)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.318.200,00	78,681,559.00	(62.363.359)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.537.550,00	56,161,277.00	(54.623.727)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.878.700,00	17,533,432.00	(13.654.732)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		7,620,000.00	(7.620.000)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.700.000,00	57,197,000.00	(54.497.000)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.100.000,00	65,567,000.00	(54.467.000)
16	Beban Obat-Obatan-Obat		4,250,000.00	(4.250.000)
17	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	34.882.350,00	5,145,872,400.00	(5.110.990.050)
18	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.430.099.217,00	42,033,000.00	31.388.066.217
	Beban Natura dan Pakan-Natura	20.744.657,00	362,599,400.00	(341.854.743)
	Beban Natura dan Pakan-Pakan	4.991.000,00		4.991.000
19	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	62,952,400.00	(61.512.400)
20	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.599.900,00	13.490.000,00	(5.890.100)
JUMLAH		**37.043.879.795,00**	**9,116,429,755.12**	**27.927.450.039,88**

3.2.5.3.2 Beban Jasa

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
8.906.237.717,50	9.084.001.195,00	(177.763.477,50)

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 8.906.237.717,50 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1	Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	310.410,00		310.410,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.050.000,00	53.250.000,00	(41.200.000,00)
3	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	188.100.000,00		188.100.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.754.800.000,00	3.122.000.000,00	(1.367.200.000,00)
5	Beban Jasa Tenaga Ahli		92.726.046,00	(92.726.046,00)
6	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	175.516.704,00	365.595.660,00	(190.078.956,00)
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	21.945.168,00	446.839.140,00	(424.893.972,00)
8	Beban Jasa Tenaga Caraka			0,00
9	Beban Jasa Tenaga Supir	65.813.184,00	284.352.180,00	(218.538.996,00)
10	Beban Jasa Audit/ Surveillance ISO	148.740.000,00	88.390.000,00	60.350.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		21.000.000,00	(21.000.000,00)
12	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	337.828.500,00	396.050.000,00	(58.221.500,00)
13	Beban Jasa Kalibrasi	22.468.342,50		22.468.342,50
14	Beban Jasa Pengolahan Sampah	3.816.000,00	1.800.000,00	2.016.000,00
15	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	48.592.000,00		48.592.000,00
16	Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan			0,00
17	Beban Tagihan Telepon			0,00
18	Beban Tagihan Air	5.199.610,00	7.862.712,00	(2.663.102,00)
19	Beban Tagihan Listrik	757.334.938,00	782.197.443,00	(24.862.505,00)
20	Beban Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	62.728.465,00	103.807.934,00	(41.079.469,00)
21	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.552.484,00	17.447.148,00	17.105.336,00
22	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	856.385.000,00	77.295.000,00	779.090.000,00
23	Beban Lembur		8.986.000,00	(8.986.000,00)
24	Beban Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan	2.800.000,00		2.800.000,00

	Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional			
25	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
26	Beban iuran jaminan kesehatan bagi non asn	115.857.735,00	236.368.432,00	(120.510.697,00)
27	Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn	4.770.000,00	9.846.000,00	(5.076.000,00)
28	Beban iuran jaminan kematian kerja bagi non asn	5.962.500,00	12.307.500,00	(6.345.000,00)
29	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	300.000.000,00	692.500.000,00	(392.500.000,00)
30	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	204.000.000,00	470.900.000,00	(266.900.000,00)
31	Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.549.320.000,00	1.413.420.000,00	135.900.000,00
32	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.559.439.000,00		1.559.439.000,00
33	Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	661.107.677,00		661.107.677,00
34	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software		21.160.000,00	(21.160.000,00)
35	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		240.200.000,00	(240.200.000,00)
36	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus		114.300.000,00	(114.300.000,00)
	Jumlah	8.906.237.717,50	9.084.001.195,00	(177.763.477,50)

Beban Pemeliharaan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
258.060.838,00	282.469.500.00	

Beban pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar sebesar 258.060.838,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.591.500,00	32.291.000,00	(29.699.500,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat	219.932.650,00		219.932.650,00

	Angkutan Apung Bermotor Lainnya			
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.800.000,00	3.180.000,00	2.620.000,00
7	Beban pemeliharaan alat laboratorium -unit alat laboratorium-unit laboratorium lainnya		198.135.000,00	(198.135.000,00)
8	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.550.000,00	17.360.000,00	(10.810.000,00)
9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	9.600.000,00	(6.150.000,00)
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		18.978.500,00	(18.978.500,00)
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.857.688,00		9.857.688,00
15	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.879.000,00		9.879.000,00
	Jumlah	258.060.838,00	282.469.500.00	(24.408.662,00)

3.2.5.3.3 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
879.323.955,00	2.708.180.200,00	(1.828.856.245,00)

Beban perjalan dinas merupakan beban perjalanan dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 879.323.955,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	874.903.955,00	2.563.592.459,00	(1.688.688.504,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap			0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.120.000,00	85.575.000,00	(82.455.000,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.300.000,00	1.430.000,00	(130.000,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		57.582.741,00	(57.582.741,00)
	Jumlah	879.323.955,00	2.708.180.200,00	(1.828.856.245,00)

3.2.5.3.4 Beban Penyusutan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2025	Tahun 2024	
51.108.996.803,75	49.758.980.018,97	1.350.016.784,78

Beban penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 Rp. 51.108.996.803,75 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.728.884.470,41	3.207.378.764,78	(486.202.199,60)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	41.132.824.298,80	40.160.058.480,81	964.746.942,76
3	Beban Penyusutan jalan,Irigasi, dan Jaringan	7.197.893.284,54	6.342.148.023,38	855.139.427,82
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya			0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	49.394.750,00	49.394.750,00	0,00
	Jumlah	51.108.996.803,75	49.758.980.018,97	1.350.016.784,78

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

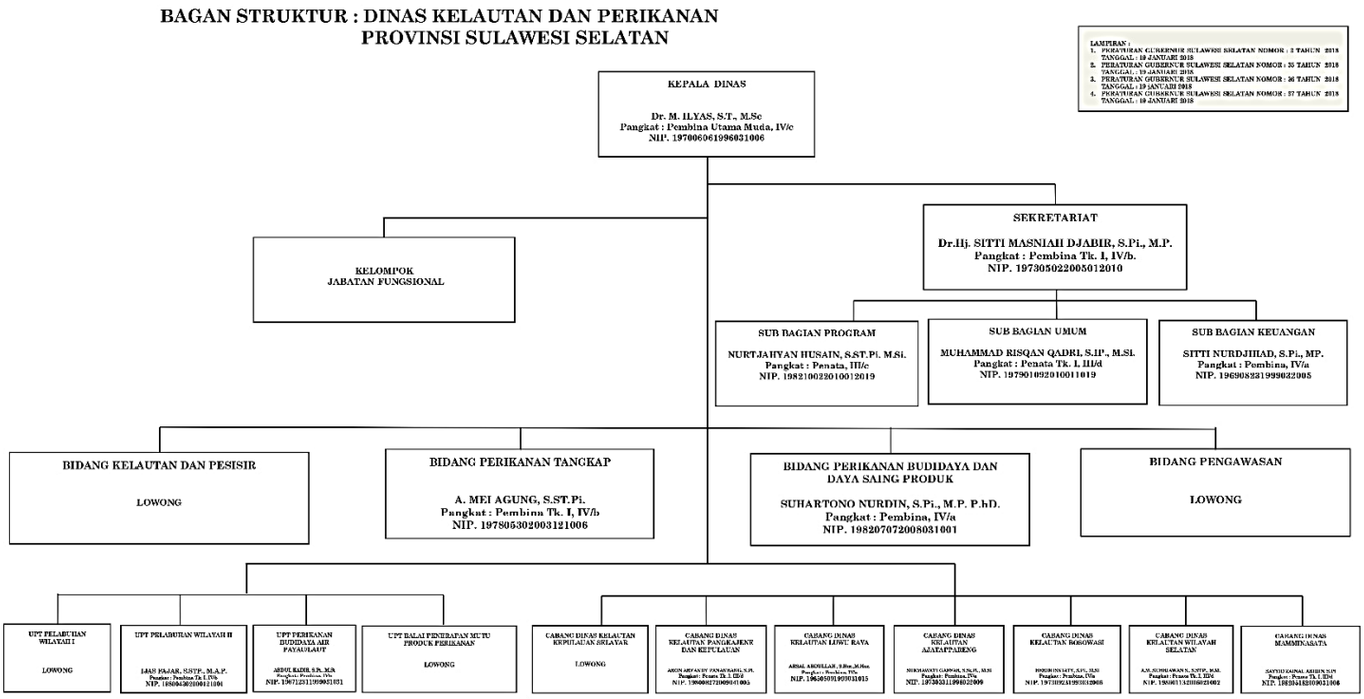
Ekuitas - LPE

Ekuitas merupakan nilai ekuitas per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2025			Rp	956.414.998.106,03
Surplus/Defitit LO T.A.2025			Rp	(116.622.295.062,69)
Rek Konsolidasi			Rp	84.066.901.158,00
Koreksi Aset Tetap			Rp.	
Koreksi Penyusutan Aset Tetap			Rp.	(2.198.307.842,71)
Koreksi Utang			Rp	
Jumlah Ekuitas – LPE			**Rp**	**921.661.296.358,63**
RK-PPKD				
Mutasi Tambah Aset	Rp	-		
SP2D LS Gaji	Rp	27.432.553.546,00		
SP2D LS Barang Jasa	Rp	49.254.346.882,50		
SP2D UP/GU/TU	Rp	2.543.798.487,00		
Jumlah Penerimaan RK-PPKD	**Rp**	**79.230.698.915,50**		
Mutasi Kurang Aset	Rp	(32.706.785,71)		
Penyetoran Pendapatan	Rp	(2.716.520.956,00)		
Pengembalian Sisa Kas 2023	Rp	-		
Pengembalian Sisa Kas 2024	Rp	(273.697.694,00)		
Jumlah Pengeluaran RK-PPKD	**Rp**	**(3.022.925.435,71)**		
Jumlah RK-PPKD			**Rp**	76.207.773.479,79
Jumlah Ekuitas Akhir Neraca			**Rp**	**997.869.069.838,42**

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1 Struktur Organisasi



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut (pergub 73 tahun 2018 tgl 19 Januari 2018), maka Dinas Kelautan Dan Perikanan didukung oleh ketersediaan sumberdaya berupa Pejabat Struktural Bagian tersebut adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi;
   a. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian Dan Hukum
   b. Sub. Bagian Program
   c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
4. Bidang Perikanan tangkap;
5. Bidang perikanan budidaya dan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
6. Bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
7. Jabatan fungsional.
8. Berdasarkan peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 36 tahun 2018, dibentuk UPT wilayah masing- masing;
   - UPT pelabuhan perikanan wilayah I, kelas A berkedudukan di kab bone, yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada kab bone, kab maros, kab pangkajene kepulauan, kab barru, kab pinrang, kab wajo, kab luwu, kab luwu utara, kab luwu timur, kota palopo dan kota pare pare;

- UPT pelabuhan perikanan wilayah II, kelas A berkedudukan di kab bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada kab bulukumba, kab gowa, kab takalar, kab jeneponto, kab bantaeng, kab sinjai, kab kepulauan selayar dan kota Makassar

Susunan organisasi UPT terdiri dari;

a) Kepala UPT;
b) Subbagian tata usaha;
c) Seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
d) Seksi tata kelola dan pelayanan usaha; dan
e) Kelompok jabatan fungsional

9. Berdasarkan pergub nomor 3 tahun 2018 dibentuk cabang dinas kelautan, masing-masing:
    a. Cabang dinas kelautan kepualuan selayar, kelas A berkedudukan di kab selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab kepulauan selayar;
    b. Cabang dinas kelautan pangkajene dan kepulauan, kelas A berkedudukan di kab pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab kepulauan pangkajene dan kepulauan;
    c. Cabang dinas kelautan luwu raya, kelas A berkedudukan di kota palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan kota palopo, kab luwu, kab luwu timur, kab luwu utara, kab tana toraja, dank aba toraja utara;
    d. Cabang dinas kelautan ajatappareng, kelas A berkedudukan di kota pare-pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab barru, kota pare-pare, kab pinrang, kab sidrap, dan kab enrekang;
    e. Cabang dinas kelautan bosowasi, kelas A berkedudukan di kab bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab bone, kab soppeng, kab wajo, dan kab sinjai;
    f. Cabang dinas kelautan wilayah selatan, kelas A berkedudukan di kab bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab jeneponto, kab bantaeng, dan kab bulukumba;
    g. Cabang dinas kelautan mamminasata, kelas A berkedudukan di kab gowa yang meliputi wilayah pelayanan kota Makassar, kab maros, kab gowa, kab takalar;

    Susunan organisasi cabang dinas, terdiri dari:

    a. Kepala cabang dinas;
    b. Sub bagian tata usaha;
    c. Seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
    d. Seksi penataan dan pengelolaan kawasan perairan; dan
    e. Kelompok jabatan fungsional.

10. Peraturan gubernur no 35 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perikanan budidaya air payau/laut. Susunan organisasi UPT, terdiri dari;
    a. Kepala UPT;
    b. Subbagian tata usaha;
    c. Seksi produksi;
    d. Seksi pelayanan teknologi dan kesehatan lingkungan; dan
    e. Kelompok jabatan fungsional.

11. Peraturan gubernur no 37 tahun 2018, tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis balai penerapan mutu produk perikanan. Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
    a. Kepala UPT;
    b. Subbagian tata usaha;
    c. Seksi standarisasi mutu;
    d. Seksi pengembangan produk; dan
    e. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan analisis data yang terkait dengan dukungan Sumberdaya Manusia terhadap Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas saat ini, maka diketahui bahwa kuantitas dan kualitas aparatur cukup memadai dalam mendukung upaya pencapaian visi, misi dan program kerja tahunan Dinas Kelautan Dan Perikanan. Meskipun disadari bahwa untuk ekselerasi pencapaian *outcomes* kegiatan masih diperlukan sentuhan pembinaan terhadap aparatur yang berada pada level eselon II sampai IV serta seluruh staf Dinas Kelautan Dan Perikanan khususnya pada aspek teknis fungsional.

Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan maka upaya pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kerja melalui kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Dinas tetap menjadi salah satu skala prioritas disamping kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan Publik.

4.2 Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Di mana Disebutkan Dalam Pasal 115 Adalah Sebagai Berikut : " Dinas Kelautan Dan Perikanan Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 2,Mempunyai Tugas Menyelengarakan Urusan Dibidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Asas Disentrialisasi,Dekonstrasi Dan Tugas Pembantuan.

4.3 Sumber Daya SKPD

Ketersediaan Tenaga tetap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sulawesi Selatan jika dilihat dari kuantitas masih sangat terbatas, dimana tenaga yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sulawesi Selatan terdiri dari 309 orang adalah PNS, diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berjumlah 170 Orang, Sedangkan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja berjumlah 139 Orang. Adapun rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ PPPK/Non ASN dan kualifikasi :

1. *Berdasarkan* Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah SDM
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II	1		**1**
2	Eselon III	8	3	**11**
3	Eselon IV	24	7	**31**
4	Fungsional	1	3	**4**
5	Pelaksana	52	71	**123**
	Jumlah	**86**	**84**	**170**

NO	ASN	Jenis Kelamin		Jumlah SDM
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	1	0	**1**
2	Golongan II	6	1	**7**
3	Golongan III	57	57	**114**
4	Golongan IV	22	26	**48**
Jumlah		**86**	**84**	**170**

NO	PPPK	Jenis Kelamin		Jumlah SDM
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IX	38	39	**77**
2	Golongan VII	5	5	**10**
3	Golongan V	34	10	**44**
4	Golongan I	8	0	**8**
Jumlah		**85**	**54**	**139**

Sumber : Subag SDM, Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

2. Jumlah Kekuatan Pegawai Negeri Sipil/PPPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan PNS	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktor (S3)	3	2	**5**
2	Magister (S2)	23	37	**60**
3	Sarjana (S1)	42	44	**86**
4	Diploma Empat (DIV)	0	0	**0**
5	Diploma Tiga (DIII)	2	0	**2**
6	Diploma Dua (DII)	1	0	**1**
7	SLTA Sederajat	14	1	**15**
8	SLTP Sederajat	0	0	**0**
9	SD	1	0	**1**
Jumlah		**86**	**84**	**170**

No.	Pendidikan PPPK	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktor (S3)	0	0	**0**
2	Magister (S2)	1	0	**1**
3	Sarjana (S1)	37	39	**76**
4	Diploma Empat (DIV)	0	0	**0**
5	Diploma Tiga (DIII)	5	5	**10**

6	Diploma Dua (DII)	0	0	**0**
7	SLTA Sederajat	34	10	**44**
8	SLTP Sederajat	0	0	**0**
9	SD	8	0	**8**
Jumlah		**85**	**54**	**139**

Sumber : Subag SDM, Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2025

4.4 Program Prioritas Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan penetapan sasaran tersebut diatas, maka pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan program sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan aparatur kelembagaan yang terdiri dari beberapa kegiatan. Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2025 yaitu :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,** Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Program ini diarahkan dalam rangka tersedianya sarana prasarana pengelolaan ruang laut dan kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi, Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi. Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
   - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   - Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
   - Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program ini diarahkan dalam rangka Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di laut dan terbinanya nelayan baik itu Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Jumlah Kelompok Nelayan Yang mendapatkan Pembinaan dan bantuan Pemerintah. Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
   - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
   - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil

4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
5. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
   - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program ini diarahkan dalam rangka Tersedianya sarana prasarana Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terbit, Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan. Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
   - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
   - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
   - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program ini diarahkan dalam rangka Tersedianya sarana prasarana pertumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil dengan Jumlah pertumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil. Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
   - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
   - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
   - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
   - Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu:
   - Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
   - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
   - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

VI. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program ini diarahkan dalam rangka Tersedianya UMKM yang mendapatkan pembinaan mutu dan berdaya saing dengan Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2025 yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
   - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
   - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
   - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir

BAB V
PENUTUP

Catatan Laporan Keuangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan,sasaran, program dan kegiatan Satuan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terperinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025

Makassar, 06 Februari 2025.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr. M. ILYAS, ST.,M.Sc

NIP : 19700606 199603 1 006

LAMPIRAN